

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

(Studi Kasus Di Desa Langge)

Oleh :

MARYAM BUHELI

NIM. S21.20.035

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**



**POGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA (Studi Kasus Di Desa Langge)

Oleh:

MARYAM BUHELI
NIM : S21.20.035

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana
Dan telah disetujui oleh pembimbing

Gorontalo, ,,,, Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Fatmah M. Ngahito, S.IP., M.Si

NIDN: 0927128301

Pembimbing II

Swastiani Dunggio, S.IP, M.Si

NIDN: 0930048307

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

PURWANTO, S.IP., M.Si

NIDN: 0926096601

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA (Studi Kasus Di Desa Langge)

Oleh:

MARYAM BUHELI
NIM : S21.20.035

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh
Pembimbing pada tanggal.....Mei 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Sandi Prahara, ST., M.Si
2. Noviyanti Tue, S.IP., M.Si
3. Rizkiyanto Ibrahim, S.Pd., M.Si
4. Dr. Fatmah M Ngabito, S.IP., M.Si
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Dekan


Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Mochammad. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101

Ketua Program Studi


Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo

Purwanto S.I.P., M.Si
NIDN : 0926096601

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryam Buheli
Nim : S2120035
Tempat/tanggal lahir : Kwandang, 10 Juni 1982
Alamat : Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Ichsan Gorontalo merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika, penulisan karya ilmiah, atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2024

Peneliti

Maryam Buheli

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

Kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk suami saya, Harun Suma terima kasih atas semua kasih sayang, nasihat, motivasi, do’a dan perjuangan yang tidak pernah mengenal kata lelah. Untuk keluarga besarku terima kasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2024

ABSTRAK

MARYAM BUHELI. S2120035. PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI DESA LANGGE)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan 2) faktor penghambat pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data utama berupa wawancara. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Peran pendamping desa dalam mengembangkan program dan pengawasan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa: a) pendamping desa telah berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, b) Pendamping desa belum berperan secara maksimal dalam pengembangan program pemberdayaan, sebab hingga saat ini kegiatan masyarakat masih berputar pada rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dan c) Dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat, pendamping desa anggrek juga melakukan pengawasan namun pengawasan tersebut masih dalam terfokus pada rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk pemerintah desa. 2) Faktor penghambat pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Langge ditinjau dari aspek kurang tepatnya perencanaan, adanya konflik, kurangnya motivasi untuk bekerja, dan inovasi tidak berkembang, serta penolakan dari kelompok tertentu.

Kata kunci: peran, pendamping desa, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

MARYAM BUHELI. S2120035. THE ROLE OF VILLAGE FACILITATORS IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN ANGGREK SUBDISTRICT OF NORTH GORONTALO REGENCY (A CASE STUDY IN LANGGE VILLAGE)

This study aims to determine 1) the role of village facilitators in community empowerment in Anggrek Subdistrict, North Gorontalo Regency, and 2) the inhibiting factors of village facilitators in community empowerment in Anggrek Subdistrict, North Gorontalo Regency. The study uses a qualitative approach through primary data collection, namely interviews. The number of informants in this study consists of 7 people. The results of this study explain that: 1) The role of village facilitators in developing programs and supervising community empowerment shows that: a) village facilitators have played a role in community empowerment activities in the form of community involvement or participation in decision-making meetings held by the village government, b) village facilitators have not played an optimal role in developing empowerment programs because until now community activities still revolve around meetings held by the village government, and c) In supervising community empowerment, village facilitators in Anggrek Subdistrict also conduct supervision, but it focuses on meetings held for the village government. 2) The inhibiting factors of village facilitators in empowering the Langge Village community are seen from some aspects, namely inaccurate planning, conflict, lack of motivation to work, undeveloped innovation, and rejection from certain groups.

Keywords: role, village facilitator, community empowerment

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'alah atas nikmat iman dan islam serta nikmat sehat dan umur Panjang merupakan anugerah bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita haturkan junjungan kepada Nabi kita Nabi Mohammad SAW, yang telah membawa kita sekalian manusia dari alam jahiliyah menuju alam berpendidikan dan keselamatan kepada umat manusia sampai akhir zaman, semoga syafaatnya bisa tercurahkan kepada kita umat beliau sekalian yang masih konsisten dengan ajarannya.

Dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, saya mengharapkan adanya koreksi atau saran yang positif dan membangun, sehingga penulisan ini dapat memberikan yang terbaik sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah pada akhirnya.

Penulis menyadari bahwa kerap kali menemui kesulitan namun berkat bantuan dan dukungan dari orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih banyak kepada kedua Orang Tua Bapak Umar N. Buheli (Alm) dan Ibu Sartin H. Hutulo, suami tercinta Bapak Harun Suma serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moril maupun nonmateril secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis tidak tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasih pula kepada pihak dibawah ini yang telah mendukung penulis dengan segala bentuk arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini : Ibu Dr. Hj. Juriko Abdusamad, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Mochammad Sakir, S. Sos., S.I.Pem., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Purwanto, S.ip., M.Si selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Ibu Dr.

Fatma M. Ngabito, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1, Ibu Swastiani Dunggio, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam Menyusun skripsi ini. Bapak/Ibu staf dosen pengajar di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan para teman-teman seperjuangan Angkatan 2020.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan kekurangan yang ada. Olehnya itu penulis berharap masukan yang positif terhadap skripsi ini. Semoga apa yang termuat di dalam skripsi ini dapat memberi manfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, aamiin.

Gorontalo, Mei 2024

Maryam Buheli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN TEORI.....	8
2.1. Peran	8
2.2. Pendamping Desa.....	9
2.3. Pemberdayaan Masyarakat	14
2.4. Prinsip Pemberdayaan.....	17
2.5. Tujuan Pemberdayaan.....	18
2.6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2.7. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberdayaan Masyarakat	19
2.8. Kerangka Pikir	20

BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Objek Penelitian.....	22
3.2. Jenis Penelitian.....	22
3.3. Fokus Penelitian.....	23
3.4. Informan Penelitian.....	24
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7. Teknik Analisis Data	26
3.8. Pengecekan Keabsahan Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2. Hasil Penelitian	33
4.2.1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	33
4.2.2. Faktor Penghambat Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	41
4.3. Pembahasan.....	52
4.3.1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	52
4.3.2. Faktor Penghambat Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.....	56
BAB V. PENUTUP	63
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan organisasi terbesar dalam pemerintahan. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara agraris, lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (Jimli Ashiddiqie, 2007). Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mengembangkan Indonesia dari desa merupakan langkah konseptual yang tepat. Desa memiliki kewenangan dan hak otonomi, sehingga aparat desa bersama masyarakat dapat mengelola dan mengurus wilayahnya secara mandiri untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Moch. Solekhan, 2014).

Dalam pemahaman tentang desa dan sebutan lainnya yang disampaikan oleh Moch. Solekhan (2014), Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah dengan tegas mengukuhkan keberadaan desa dalam struktur negara Indonesia. Undang-undang ini menetapkan perubahan pendekatan terhadap desa, dari yang sebelumnya berfokus pada kontrol dan mobilitas pemerintah menjadi pendekatan pemberdayaan desa. Menurut Rahardjo (2018), perlindungan dan pemberdayaan desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, keadilan dalam peningkatan sumber daya manusia menjadi syarat penting bagi terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

Salah satu tujuan reformasi pemerintahan Indonesia adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan nasional yang dimulai dari desa secara menyeluruh dan merata bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan desa. Hal ini dapat dilihat dari kemandirian dan kualitas pembangunannya, yang dicapai melalui pendampingan dan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pendampingan desa, sangat penting untuk pengawasan kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendampingan desa merupakan konsep baru yang muncul di era reformasi. Pada awal tahun 2014, Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa "pemerintah membuat kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia dan kebijakan tenaga kerja yang disebut pendamping desa." Untuk memperkuat pemahaman tentang peran pendamping desa, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, yang mengatur pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Keberadaan pendamping desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, tugas pendamping desa meliputi mendampingi desa dalam penyelenggaraan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara lebih rinci, tugas pendamping desa adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
2. Membantu desa dalam mengelola layanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong munculnya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Mengoordinasikan pendampingan desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi pelaporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, peran pendamping desa sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendamping desa harus bergerak cepat dalam menyusun strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur desa, dengan tujuan

memperluas pembangunan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sulistyo (2019) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri. Proses ini mencakup peningkatan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan pemikiran serta tindakan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, melalui kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih berdaya.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan saat ini, mengingat perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang kian pesat. Oleh karena itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh pendamping desa melalui proses pemberdayaan.

Sulistyo (2019) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri. Proses ini mencakup peningkatan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan pemikiran serta tindakan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, melalui kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok agar menjadi lebih berdaya. Kurang efektif yang dimaksud ialah banyak ketidaksesuaian di balik keberadaan pendamping desa sebagai fasilitator desa yang ternyata masih gagal dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika berada di lapangan.

Selain hal diatas seperti yang ditemukan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa pendamping desa di kecamatan Anggrek belum maksimal maupun optimal dalam menjalankan tugasnya karena fokus pekerjaan pendamping desa tidak hanya bekerja untuk satu desa. Sehingga hal ini yang mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, yang menjadikan masyarakat tersebut tidak ikut serta dalam pembangunan, bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan dan apa sebenarnya tugas dari pendamping desa.

Oleh sebab itu peran pendamping desa penting untuk dilakukan penelitian, mengingat salah satu sasaran yang ingin dicapai terhadap tujuan pendamping desa adalah mempercepat upaya pemerintah dalam pembangunan di desa melalui pemberdayaan masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Desa Langge)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Apa saja faktor Penghambat dari Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat dari Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran terhadap akademisi dan peneliti terkait dengan penelitian tentang peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dibidang Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pendamping Desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan maupun kinerja Pendamping Desa untuk mewujudkan desa yang mandiri.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan peneliti dalam memberikan gambaran yang jelas berkaitan peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa mandiri.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinikan peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat. Soerjono Soekanto (2017), mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia sedang menjalankan suatu peran. Setiap individu memiliki berbagai peran yang menentukan kontribusinya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peran tersebut. Assauri (2017) menyatakan bahwa ketika seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan perannya, terdapat tiga aspek yang terlibat:

1. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran adalah serangkaian aturan yang membimbing individu dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari sebuah organisasi.
3. Peran dapat dianggap sebagai perilaku individu yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Merton (dalam Raho 2007) mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Lebih lanjut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer 2003) Teori peran memberikan

konsep dalam studi perilaku dalam organisasi. Teori ini menyatakan bahwa peran melibatkan pola penciptaan produk, berbeda dari sekadar perilaku atau tindakan

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di tengah masyarakat. Orang yang memiliki kedudukan tersebut dapat disebut sebagai pemegang peran. Bagong Suyanto (2010) menyebutkan peranan mampu membimbing seseorang dalam bersikap dan berperilaku, karena fungsi dari peran itu sendiri ialah :

1. Memberi arahan pada sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan.
3. Hal ini dapat menyatukan kelompok dan komunitas,
4. juga dapat mengaktifkan sistem komando dan kontrol untuk melindungi kehidupan masyarakat.

2.2 Pendamping Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dimana pendampingan desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Tindakan pemberdayaan salah satunya yaitu asistensi, dimana asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal ini bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang

dikarenakan masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa sehingga diperlukanya asistensi dari pendamping desa.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan secara teknis bahwa pendampingan desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping professional sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdiri dari :

1. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengembangan hal-hal yang berskala lokal di desa.
2. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengembangan yang berskala lokal desa.
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada peraturan di atas tersebut tenaga pendamping harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan teknik.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, menyebutkan bahwa Pendamping Desa merupakan suatu jabatan yang berada di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi, Indonesia yang mempunyai misi membantu pemerintah dalam memperkuat masyarakat desa. Peran Pendamping Desa adalah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, dalam rangka memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Kementerian Desa dan Desa menjelaskan bahwa pendampingan desa mempunyai tujuh tugas pokok: Itu adalah:

1. Membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa serta penguatan masyarakat desa.
2. Membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, mengembangkan usaha ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, mengembangkan infrastruktur desa dan memperkuat masyarakat desa.

3. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka pengembangan dan penguatan masyarakat desa.
4. Berorganisasi dalam kelompok masyarakat desa.
5. Meningkatkan kapasitas kader untuk memperkuat masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader baru untuk pembangunan desa.
6. Bantuan kepada desa dalam pembangunan perdesaan secara partisipatif, dan
7. Koordinasi bantuan di tingkat kecamatan dan fasilitasi pelaporan camat kepada pemerintah daerah kecamatan/kota atas pelaksanaan bantuan.

Tugas-tugas diatas tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu seorang pendamping desa haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seseorang pendamping desa menurut Sumodiningrat dkk (2016) harus memiliki :

1. Pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan melalui berbagai dokumen pengalaman.
2. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
3. Dapat mendukung proyek perekonomian masyarakat desa.
4. Menerapkan teknik untuk mendukung kelompok masyarakat desa pada pertemuan desa.
5. Peka terhadap adat istiadat, adat istiadat, dan nilai budaya masyarakat.

Pendamping Desa didukung oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan dalam menjalankan misinya mendampingi pemerintah desa dalam

melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi syarat pendamping lokal desa berdasarkan panduan rekrutmen tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan Minimal : Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat.
2. Pengalaman minimal 2 tahun dalam kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat.
3. Mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan di desa.
4. Memiliki pengetahuan tentang pengembangan kapasitas, pengembangan eksekutif, dan organisasi kemasyarakatan.
5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik lisan dan tulisan.
7. Mempunyai kesanggupan dan kesanggupan bekerja sama dengan perangkat desa.
8. Kemampuan mengoperasikan komputer dengan program perkantoran minimal (Word, Excel, Power Point) dan internet.
9. Mampu bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan bersedia tinggal dilokasi
10. Usia minimal untuk mendaftar adalah 25 tahun dan maksimal 50 tahun.

11. Bukan pengurus partai politik dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan partai politik.
12. Saat ini tidak terdapat kontrak kerja profesional dengan pihak lain.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), “pemberdayaan” sebagai terjemahan dari kata “pemberdayaan” dalam pengertian tradisional mempunyai dua arti. Hal-hal tersebut adalah: (1) pemberian atau penganugerahan kekuasaan, pengalihan kekuasaan, atau pendelegasian kekuasaan kepada pihak lain; Otoritas atas orang lain. (2) Memberikan atau memberdayakan kemampuan atau berupaya memberikan kemampuan atau pemberdayaan; Dalam pengertian ini jelas bertujuan untuk menciptakan peluang mewujudkan keberdayaan diri dengan membuka ruang akses informasi.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sistem semi tertutup atau semi terbuka, dengan sebagian besar interaksi terjadi antara individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari orang sebagai anggota kelompok. Munculnya kelompok-kelompok tersebut disebabkan oleh dua sifat manusia yang bertolak belakang. Di satu sisi ingin bekerja sama, namun di sisi lain cenderung bersaing dengan orang lain Meriam Budiarjo (2008). Pemberdayaan masyarakat seringkali sulit dibedakan dengan pengembangan masyarakat karena adanya tumpang tindih makna bila digunakan dalam masyarakat.

Dalam pembahasan ini pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat mengacu pada perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan

sumber daya pada masyarakat lokal sehingga pada akhirnya memiliki kapasitas dan kemandirian dari sudut pandang ekonomi, lingkungan, dan social, dimana pemerintah melakukan upaya sadar untuk mendukung mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya berkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memerlukan kondisi yang menjadikan kemandirian masyarakat berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan pembangunan, dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala pengambilan keputusan dan keputusan politik serta mempunyai hak yang sama. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dipahami dari kata “memberdayakan” dan “memberdayakan” atau dalam bahasa Indonesia “memberdayakan”. Konsep pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya untuk mengefektifkan suasana adil, beradab, dan humanistik dalam kehidupan keluarga, komunitas, bangsa, komunitas internasional, atau dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Penguatan sosial merupakan upaya untuk lebih meningkatkan harkat dan martabat strata sosial yang saat ini belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Aprilia Theresa, 2014).

Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Pasal 127 Poin 2 tentang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu

pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menggali minat serta partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan dan kemandirian desa yang dilaksanakan dengan :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan secara mandiri oleh desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam desa.
3. Membuat rencana pembangunan desa berdasarkan prioritas, kemungkinan dan nilai kearifan lokal.
4. Mengembangkan perencanaan dan penganggaran yang mendukung kepentingan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa.
6. Memanfaatkan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan desa melalui musyawarah desa.
8. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia masyarakat pedesaan.
9. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada masyarakat desa serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan pemerintahan desa secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan maupun suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu mengadopsi sebuah inovasi demi terciptanya peningkatan produktifitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan.

2.4 Prinsip Pemberdayaan

Menurut Oos M.Anwas (2014), dalam melaksanakan pemberdayaan, agar pemberdayaan dapat dilakukan dengan benar, diperlukan prinsip-prinsip sebagai dasar pemberdayaan:

1. Menghindari unsur pemaksaan melalui pelaksanaan secara sukarela atau demokratis. Sebab setiap orang mempunyai kebutuhan, permasalahan, hambatan, tuntutan dan kemungkinan yang berbeda-beda.
2. Kegiatan penguatan masyarakat didasarkan pada kebutuhan, permasalahan, dan kemungkinan.
3. Pemberdayaan tidak terjadi pada satu aspek saja, tetapi harus terjadi secara menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2.5 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterampilan, budaya, atau kekuatan masyarakat agar siap

menghadapi tantangan zaman, memperkecil kesenjangan desa-kota, dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur, kami bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di lokasi.

Tujuan penguatan Peraturan Nomor 3 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan intensif pemerintah desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Hal ini dapat dicapai dengan benar-benar memperkuat masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil di masyarakat.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa lintas sektor. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama memerlukan program-program yang sinergis dan saling mempengaruhi.
4. Mengoptimalkan aset lokal desa dengan cara yang memerdekakan. Pemanfaatan sumber daya milik desa yang ada serta pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa merupakan langkah menuju optimalisasi pengelolaan aset lokal desa yang sebaiknya dikelola secara mandiri untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

2.6 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan indikator pemberdayaan. Maka indikator pemberdayaan yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.
2. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
3. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

2.7 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ibrahim (dalam Haqqie 2016), ada enam faktor utama yang menghambat promosi inovasi, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perencanaan atau estimasi yang akurat dalam proses difusi inovasi.
2. Terdapat konflik dan motivasi yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, seperti tantangan antar anggota tim pelaksana, kurangnya motivasi kerja, dan perbedaan sikap pribadi yang mempengaruhi kelancaran proses inovasi.
3. Inovasi tidak berkembang
4. Masalah keuangan

5. Penolakan dari kelompok tertentu.
6. Kurangnya hubungan sosial.

Sedangkan menurut Arsiyah (Haqqie 2016), terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Kegagalan internal adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Ketidaktersediaan bahan baku
3. Keterbatasan kemampuan manajemen
4. Tidak ada kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha.

Saat ini terdapat kegagalan eksternal berikut:

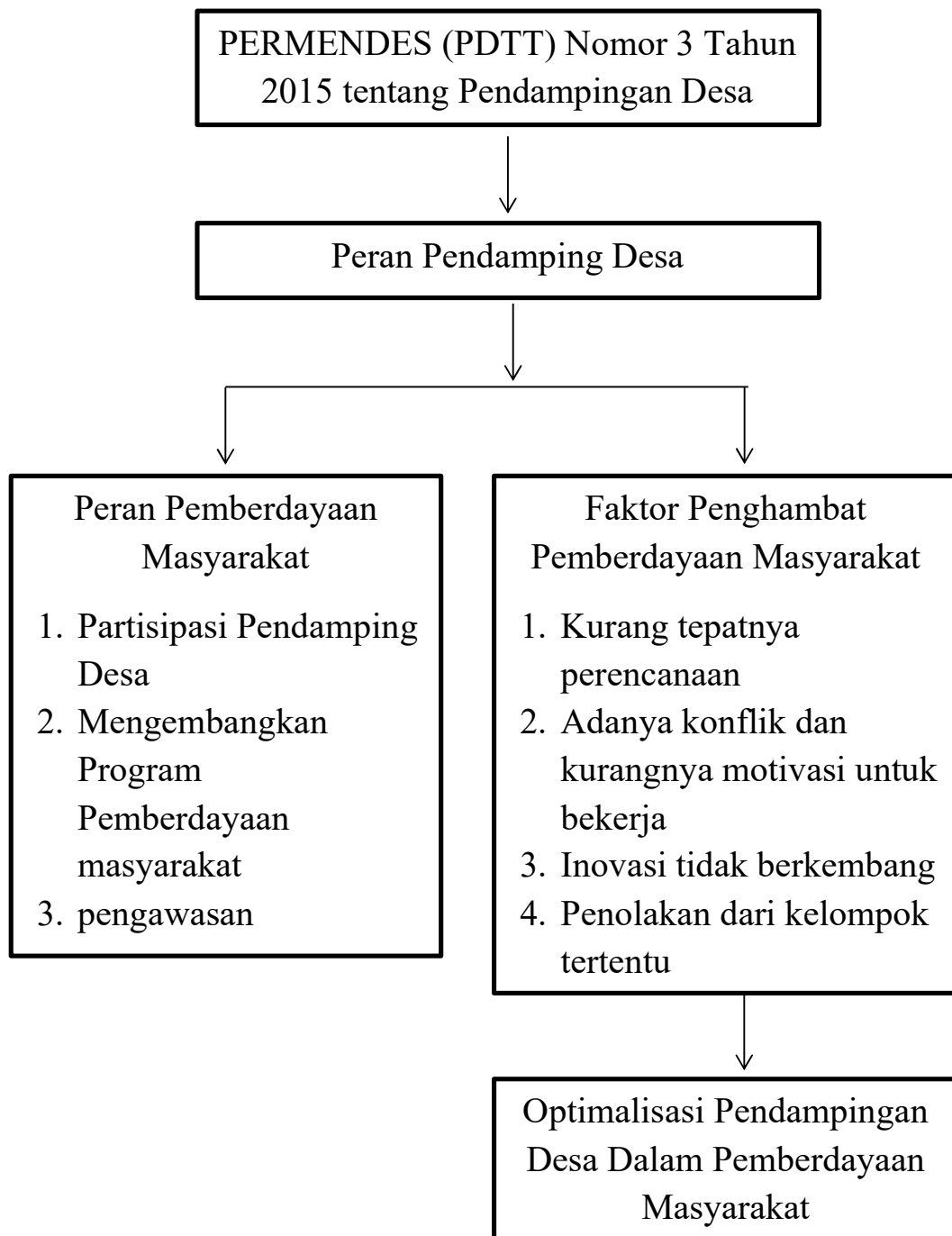
1. Akses terhadap kelompok usaha patungan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan pengusaha masih kurang optimal.
2. Belum ada pihak swasta yang bersedia memberikan bantuan permodalan sebagai sarana penguatan perekonomian masyarakat.

2.8 Kerangka Pikir

Peran pendamping desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa terdapat indikator pemberdayaan masyarakat untuk mengukur proses pemberdayaan. Untuk menjalankan peran tersebut pastilah

memiliki hambatan-hambatan yang ditemui seperti hambatan internal dan eksternal.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian dilaksanakan di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun pertimbangan peneliti dalam pemilihan lokasi ini diantaranya yaitu terdapat permasalahan yang telah di kemukakan pada bab pendahuluan serta kemudahan dalam mengakses lokasi penelitian. Waktu penelitian yang direncanakan ialah selama tiga bulan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal di pertimbangkan dengan maksud untuk memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Koentjaraningrat (2015), menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi maupun penyebaran suatu gejala alam masyarakat.

Sedangkan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018) mengartikan bahwa metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan
 - b. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat
 - c. Peran pendamping desa dalam pengawasan program pemberdayaan masyarakat
2. Faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat yang meliputi faktor internal Menurut Ibrahim (dalam Haqqie 2016), yaitu :
 - a. Kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi.
 - b. Adanya konflik dan motivasi yang disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertantangan antar anggota tim pelaksana, kurang motivasi untuk bekerja dan berbagai macam sikap pribadi yang mengganggu kelancaran proses inovasi.
 - c. Inovasi tidak berkembang
 - d. Masalah finansial
 - e. Penolakan dari kelompok tertentu.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kuantitatif berkembang terus terus (*snowball*) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai di lingkungan pemerintah desa Langge, masyarakat setempat dan pendamping desa.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Pendamping Desa	1 Orang
4	Ketua BPD	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat	3 orang

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan informan yang telah dipilih.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dokumen-dokumen resmi, peraturan, buku serta petunjuk lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian yaitu memperoleh data. Oleh sebab itu, pengumpulan data yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian guna mendapatkan kelengkapan data serta mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan sehingga informasi

yang dikumpulkan cukup mendalam. Hal semacam ini bertujuan untuk menggali kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014) analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti. Reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan informasi data yang diberikan.
- b. Mengecek kelengkapan instrument atau daftar pertanyaan apakah sesuai dengan indikator kinerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang diberikan oleh informan

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman, Miles dan Humberman (dalam Saldana, 2014).

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti. Suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga

upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

3.8 Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka perlu diadakannya pengujian data yakni uji keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan kriteria untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya dan teruji kebenarannya. Uji kredibilitas adalah merupakan instrument dalam penelitian kualitatif, sehingga memungkinkan terjadi informasi bias, untuk menghindari hal itu perlu di uji kebenarannya pengecekan kredibilitas perlu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Untuk memperoleh data valid, pengecekan data dilakukan melalui :

1. Pengamatan terus menerus
2. Triangulasi
3. Pengecekan atas kecukupan referensi.

Teknik pengamatan terus menerus digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam fokus masalah penelitian, peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat.

Pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

1. Triangulasi sumber data yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber yang lain.
2. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengecek kembali keabsahan data dengan berulang-ulang kali. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicek dengan observasi atau sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Langge merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Meskipun tidak sebesar kota-kota di sekitarnya, desa ini memiliki daya tarik dan karakteristik uniknya sendiri. Desa Langge di Mekarkan dari Desa Tolongio pada Tahun 2011, yang sebagian besar Penduduknya adalah Nelayan dan Petani Tradisional. Nama Desa Langge di ambil dari bahasa Gorontalo artinya “ NANGKA “ Desa Langge dibuka oleh Pendatang dari Suku Minahasa, Sangir Talaud dan Gorontalo yang tujuannya mereka adalah membuka lahan Pertanian Pada tahun 2012 Desa Langge di Pimpinan Oleh Bapak “ATO ALI” menjadi Kepala Desa yang Definitif .

1. Letak Geografis Desa Langge

Desa Langge terletak di bagian Utara dari Desa Tolongio (Desa Induk) yang mempunyai Luas Wilayah $\pm 543,5$ Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ☞ Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Laut Sulawesi
- ☞ Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tututwoto
- ☞ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tolongio
- ☞ Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Ilodulunga

2. Keadaan Demografis Desa Langge.

Keadaan demografis merupakan keadaan suatu wilayah yang membahas keadaan penduduk seperti halnya keadaan penduduk. Adapun keadaan penduduk Desa Langge sebagai berikut:

a. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak – anak dan lansia. Dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki – laki dari perempuan. Untuk lebih jelasnya data penduduk Desa Langge Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1) Keadaan penduduk desa Langge berdasarkan usia

Tabel 4. 1 keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0 – 15 Tahun	89 Jiwa	55 Jiwa
16 – 55 Tahun	155 Jiwa	149 Jiwa
Lebih dari 55 tahun	15 Jiwa	22 Jiwa
Total	339 Jiwa	336 Jiwa

Sumber: Profil Desa Langge 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan dan jumlah usia produktif lebih banyak dari usia anak-anak dan lanjut usia, tabel di atas juga menunjukan jumlah usia anak-anak, usia produktif dan lanjut usia lebih banyak adalah perempuan.

2) Keadaan penduduk desa Langge berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 4.2 keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	13 Orang
2	Nelayan	102 Orang

3	Pedagang	6 Orang
4	Tukang	6 Orang
5	Kariawan	7 Orang
6	PPPK	1 Orang
7	TNI / Polri	1 Orang
8	Perangkat Desa	28 Orang
9	Pengrajin	3 Orang
10	Wiraswasta	8 Orang
11	Tukang Jahit	1 Orang
12	Peternak	45 Orang
13	Buruh	2 Orang

Sumber: Profil Desa Langge 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, menunjukan bahwa mata pencaharian desa Langge yang paling banyak adalah nelayan sebanyak 102 orang, sedangkan penduduk desa dengan mata pencaharian yang paling sedikit adalah PPPK, TNI / Polri dan Tukang Jahit sebanyak 1 orang.

3) Keadaan penduduk desa Langge berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar peserta didik bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya atau kata lainnya meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa membawa perubahan untuk daerah mejadi lebih baik. Adapun keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Langge adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keadaan penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat SD	159 Orang
2	Tamat SD	154 Orang
3	Tamat SMP/Sederajat	33 Orang
4	Tamat SMA/Sederajat	21 Orang
5	Diploma/Sarjana	6 Orang

Sumber: Profil Desa Langge 2024

Berdasarkan table 4.3 diatas, menunjukan tingkat pendidikan desa Langge yang paling banyak adalah Tidak Tamatan SD, sedangkan penduduk desa dengan Pendidikan sampai pada tamatan perguruan tinggi hanya terdapat 6 orang.

1.1 Hasil Penelitian

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (2017), mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan indikator pemberdayaan. Maka indikator pemberdayaan yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Peran Pendamping Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari indikator: 1) Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan. 2) Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. 3) Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

- a. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat desa Langge Kecamatan Anggrek pada dasarnya merupakan suatu proses alamiah masyarakat. Namun di era modernisasi seperti saat ini sangat jarang dijumpai masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa atas dasar kehendak masyarakat sendiri. Sehingga untuk mengembalikan partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan peran dari semua pihak pemangku kepentingan termasuk peran pendamping desa.

Adapun peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan di desa Langge kecamatan Anggrek, seperti yang dikemukakan oleh kepala desa Langge, bahwa:

“...pendamping desa mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa Sosialisasi tentang perencanaan pembangunan desa. cara yang dilakukan pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa yaitu sekedar sosialisasi tentang pembangunan ataupun pemanfaatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Pernyataan diatas juga sama dengan yang di sampaikan oleh Sekertaris desa Langge, yang mengemukakan bahwa:

“...pendamping desa Langge mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat terlibat dalam pembahasan tentang penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Stategi yang dilakukan oleh pendamping desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat yaitu sosialisasi tentang pembangunan ataupun pemanfaatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Terkait peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan di desa Langge. Pendamping desa Langge juga mengemukakan bahwa:

“...kami sangat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan karena kegiatan inilah yang menjadi tupoksi dari kami TPP. banyak keterlibatan masyarakat dalam hal pemberdayaan ikut berpartisipasi pada kegiatan perencanaan, pembangunan desa, dan pengawasan serta peningkatan kapasitas masyarakat. peran pendamping desa dalam hal mendorong masyarakat supaya berperan dalam pembangunan desa sangat Nampak dalam hal tujuan desa sehingga bisa diterima dan bisa merangkul masyarakat dalam hal pembangunan desa...” (Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Pendapat diatas senada dengan yang sampikan oleh masyarakat desa Langge yang mengemukakan bahwa:

“...pendamping desa Langge telah mendorong masyrakat untuk telibat dalam kegitan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerntah desa. Kami diajak untuk terlibtan dalam kegiatan-kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di Desa...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Pernyataan diatas sama juga dengan yang disampaikan oleh masyarakat lain yang berada di desa Langge yang menyatakan bahwa:

“...dalam menjalankan tugasnya pendamping desa selalu melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi setiap kegiatan di Desa Seperti pertemuan di kantor desa ada sosialisasi kepada masyarakat misalnya ada program-program kabupaten yang disampaikan ke desa. Pendmping desa memberikan pemahaman agar ikut serta masyarakat dalam pembangunan desa ...” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping desa Langge Kecamatan Anggrek telah melaksanakan perannya dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Langge. Partisipasi masyarakat tersebut diawali dengan hadirnya masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa.

b. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat

Dengan memainkan peran ini, pendamping desa dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi yang ada.

Terkait peran pendampingan desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di desa Langge kecamatan Anggrek, kepala desa Langge mengemukakan, bahwa:

“...pendamping desa menguasai aturan pelaksanaan atau juknis pendampingan. Dalam kegiatan pendampingan, pendamping desa tidak melakukan pengembangan program pemberdayaan, namun mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Pendapat diatas juga sama dengan yang di sampaikan oleh Sekertaris desa Langge, yang menyatakan bahwa:

“...dalam melaksanakan tugasnya pendamping desa menguasai lingkup kerjanya berdasarkan juknis pendampingan. Pada dasarnya pendamping desa mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun untuk mengembangkan program atau kegiatan tidak dilakukan secara langsung...” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Mengenai peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan di desa Langge. Pendamping desa Langge mengemukakan bahwa:

“...Kami sangat menguasai tupoksi kerja, kami sebagai TPP yang punya predikat professional dengan besik ilmu yang berbeda harus bisa menguasai kondisi wilayah yang ada. Untuk pengembangan pemberdayaan kami TPP sudah berperan maksimal, ada desa yang sudah naik status yang awalnya sangat tertinggal alhamdulillah sudah naik berkembang dan bahkan bisa menjadi status desa mandiri di tiga di kecamatan anggrek dan menghapus status desa tertinggal. Peran pemberdayaan masyarakat sangat Nampak adanya kegiatan pendamping ini pemerintah desa dan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

dan untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri banyak kelompok-kelompok UMKM yang sudah dilatih dan diberi modal usaha...” (Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Berbeda dengan pendapat diatas yang dikemukakan oleh pendamping desa. Iko Mustapa selaku Masyarakat desa Langge mengemukakan hal yang berbeda bahwa:

“...dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa tentu mereka menguasai lingkup kerjanya. Tetapi dalam hal pengembangan program pemberdayaan seperti saya sebagai masyarakat kurang tau, karena program yang dilaksanakan di desa Langge ini hanya program dari pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Serupa dengan pernyataan diatas, masyarakat desa

Pernyataan diatas sama juga dengan yang disampaikan oleh Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge yang mengatakan bahwa:

“...dalam menjalankan tugasnya pendamping desa sejauh ini dan seperti yang kami rasakan tidak melakukan pengembangan program pemberdayaan, yang ada hanya hadir dan membantu mengarahkan pemerintah desa dalam rapat-rapat yang dilaksanakan di desa...” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa, pendamping desa Langge kecamatan Anggrek tidak melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan hingga saat ini hanya berupa keterlibtan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

c. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di tingkat desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat

Berkenaan dengan peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat di desa Langge kecamatan Anggrek, kepala desa Langge menyatakan, bahwa:

“...Pendamping desa Langge melakukan pengawasan Bidang pembangunan desa dalam hal sarana prasarana pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan khusus untuk ketahanan pangan yang bergerak pada kegiatan khusus yang menyentuh masyarakat. Pendamping desa melakukan pengawasan program pemberdayaan dengan melakukan kegiatan monitoring dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Senada dengan pernyataan diatas terkait adanya pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa. Sekertarsi desa Langge mengemukakan bahwa:

“...Pendamping desa melakukan pengawasan. Salah satunya pembangunan drainase dan kegiatan fisik lainnya itu ada pendampingan dari pendamping desa, pendamping desa juga memberikan penguatan-penguatan terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan itu...” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Pendapat diatas juga didukung oleh ketua BPD desa Langge yang menyatakan, bahwa:

“...dalam melaksanakan tugasnya pendamping desa Langge melakukan pengawasan program. Adapun yang sering ia lakukan berupa pendampingan rapat, misalnya rapat RKPDES dan APBDES...” Hasil Wawancara, SA, 19 Februari 2024).

Terkait peran pendamping desa dalam pengawasan program pemberdayaan di desa Langge. Pendamping desa Langge mengatakan bahwa:

“...dalam hal pengawasan itu sudah menjadi tupoksi TPP. Contoh pengawasan saat ini khusus dana desa dibagi dalam beberapa bidang : 1) Bidang pemerintahan, hal ini terkait dana siltap honor dan untuk kegiatan pemerintah desa. 2) Bidang pembangunan desa dalam hal ini sarana\prasarana pembangunan infrastruktur desa . 3) Bidang pembinaan, peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada kelompok. 4) Bidang pemberdayaan khusus untuk ketahanan pangan yang bergerak pada kegiatan yang menyentuh masyarakat. 5) Kegiatan mendesak dan tak terduga (BLT). Semua ini yang harus kami awasi. kami ada tim yang dibentuk mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan setiap ada kegiatan kami melaksanakan monitoring dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan...” Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Sama halnya dengan pernyataan diatas. Terkait adanya pengawasan pelaksanaan program dari pendamping desa. Iko Mustapa selaku masyarakat desa Langge menyampikan bahwa:

“...selama rapat yang dilaksanakan di desa Langge ini. Selalu di dampingi oleh pendamping desa. Dia melakukan pengawasan pelaksanaan rapat oleh pemerintah desa. Tapi untuk pengawasan pelaksanaan program pembagunan itu tidak ada.

Yang dilakukan berupa pendampingan dan pengawasan pada saat rapat...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Sependapat dengan ungkapan diatas. Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge mengatakan bahwa:

“...pendamping desa tidak melakukan pengawasan program dilapangan, tetapi mereka hanya melakukan pengawasan saat pertemuan rapat saja yang dilakukan oleh pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan peran pendamping desa di desa Langge kecamatan Anggrek bahwa pendamping desa Langge melakukan pengawasan sebagaimana tugas dari tenaga pendamping desa. Namun pengawasan ini hanya terfokus pada kegiatan pertemuan rapat atau pembahsan-pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah desa berserta masyarakat. Untuk pengawasan pelaksanaan program di tingkat lapangan atau implementasi ditingkat masyarakat itu tidak ada pengawasan dari pendamping desa.

2. Faktor Penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam menjalankan peran sebagai pendamping desa untuk memberdayakan masyarakat merupakan suatu peranan yang tidak mudah. Banyak faktor yang akan menjadi penghambat dalam memberdayakan masyarakat agar aktif pada setiap kegiatan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga seorang pendamping desa

harus memiliki kualifikasi yang mampu dalam melaksanakan tugas perannya.

Hambatan dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai pendamping juga dihadapi oleh pendamping desa yang berada di kecamatan anggrek. Faktor penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari indikator: 1) kurang tepatnya perencanaan. 2) adanya konflik dan kurangnya motivasi untuk bekerja. 3) inovasi tidak berkembang. 4) penolakan dari kelompok tertentu.

a. Kurang Tepatnya Perencanaan

Kurang tepatnya perencanaan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan program atau proyek. Perencanaan yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan perannya pendamping desa harus memiliki keterampilan dalam menyusun rencana program pemberdayaan.

Terkait perencanaan program pendampingan masyarakat desa Langge, Kecamatan Anggrek oleh pendamping desa. Kepala desa Langge mengemukakan bahwa:

“...Pendamping desa Langge memiliki perencanaan kegiatan, sesuai dengan juknis pendamping desa. Dalam menjalankan tugas pendamping desa hanya melakukan pendampingan. Namun untuk menyusun perencanaan kegiatan desa yang terlibat yakni pendamping desa, pemerintah desa dan masyarakat...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Pernyataan diatas juga sama dengan yang diutarakan oleh Sekertaris desa Langge yang mengatakan bahwa:

“...kalau pendamping desa memiliki perencanaan pendampingan dan itu akan disampaikan di pemerintahan desa. Penyusunan rencana kegiatan pendamping sesuai dengan juknis pendamping desa. Penyusunan perencanaan kegiatan yang disusun oleh pendmping desa dan pemerintah desa serta masyarakat yaitu perencanaan program yang akan dibiaya melalui dana desa....” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Pendampat diatas juga didukung oleh ketua BPD desa Langge yang menyatakan, bahwa:

“...untuk perencanaan pendamping desa terkait kegiatan pendampingan program pemberdayaan kayaknya mengacu dijuknisnya pendamping. Kalaupun pendamping melakukan penyusunan rencana kegiatan dengan pemerintah desa pasti perencanaan yang disusun itu adalah program atau kegiatan desa yang di baiaya melalui APBN...” Hasil Wawancara, SA, 19 Februari 2024).

Terkait kurang tepatnya perencanaan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pendamping desa Langge mengatakan bahwa:

“...kami punya RKTl dan pelaporan. RKTl pendamping disesuaikan dengan regulasi dibidangnya terutama permendes. khusus pendamping program kami Bersama TPP dimasing-masing kecamatan tapi untuk pendamping perencanaan pembangunan desa itu Bersama pemerintah desa dan masyarakat. perencanaan ini mengacu pada RPJMDES, RKPDES, dan APBDES setelah itu kami melakukan pengawasan. Yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pemerintah desa tokoh masyarakat kelompok pemuda pendamping pemerintah kecamatan serta kabupaten. Sangat sesuai dan harus termuat di RPJMDES, dituang di RKPDES dan

ditetapkan di APBDES untuk pendanaan...” Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Terkait adanya perencanaan kegiatan pendampingan oleh pendamping desa. Iko Mustapa selaku masyarakat desa Langge menyampaikan bahwa:

“...terkait hal itu kami sebagai masyarakat tidak terlalu tau dengan agenda pendampingan oleh pendamping desa. Sebab kami hanya melihat pendamping desa ketika ada pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Sesuai dengan ungkapan diatas. Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge mengatakan bahwa:

“...mengenai perencanaan kegiatan pendampingan oleh pendamping desa sepetinya hanya pemerintah desa yang tahu. Biasanya pendamping desa hanya berada di kantor desa bersama pemerintah desa. Kami masyarakat bertemu dengan pendamping bila ada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh kepala desa...” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping desa dalam melaksanakan perannya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa Langge telah berdasarkan rencana kerja. Namun perencanaan pendampingan yang disusun oleh pendamping lebih pada kegiatan-kegiatan pendampingan pemerintah desa berupa pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

b. Adanya Konflik Dan Kurangnya Motivasi Untuk Bekerja

Setiap organisasi dalam mencapai tujuan membutuhkan kerjasama yang baik sesama team atau anggota. Serta adanya motivasi

dari pimpinan. sehingga dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting bagi setiap oaring yang berada didalam organisasi meminimalir potensi konflik yang dapat menghambat terjainnya kerjasama antar individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Begitu juga dalam kegiatan pendamping desa, untuk mencapai tujuan program pendampingan maka pendamping desa perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjanya baik itu pemerintah desa maupun masyarakat

Terkait hubungan emosional pendamping desa dan pemerintah desa serta masyrakat desa Langge dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa Langge, Kecamatan Anggrek. Kepala desa Langge mengemukakan bahwa:

“...selama ini hubungan antara kami dengan pendamping baik-baik saja, begitu juga hubungan antara pendamping dan masyarakat. Untuk pelaksanaan tugas pendampingan telah sesuai dengan tugasnya...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Senada dengan pernyataan diatas Sekertaris desa Langge juga mengemukakan bahwa:

“...sejauh yang saya tau selama ini tidak ada konflik antara pemerintah desa dengan pendamping desa, konflik antara masyarakat dengan pendamping desa. Karena pendamping desa biasanya ada kalau ada hal-ha yang perlu di koordinasikan terkait kegiatan serta pertemuan atau rapat yang kami selenggarakan....” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Pernyataan diatas juga sama dengan yang dikemukakan oleh ketua BPD desa Langge, bahwa:

“...pendamping desa selama bekerja di desa Langge tidak memiliki konflik dengan pihak manapun, karena pemerintah desa dan masyarakat merupakan mitra kerja pendamping desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pun pendamping desa selalu berpatokan pada juknis pendampingannya....” Hasil Wawancara, SA, 19 Februari 2024).

Terkait hubungan emosional pendamping dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Langge menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pendamping desa Langge mengemukakan bahwa:

“...tidak, karena tujuan kami bukan untuk berkonflik dengan pemerintah desa dan masyarakat. kami TPP bekerja sesuai tupoksi dan SOP pendamping dan harus ada RKTL serta tujuan output kegiatan di masing-masing desa....” Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Menganai hubungan pendamping dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Langge. Iko Mustapa selaku masyarakat desa Langge menyampaikan bahwa:

“...karena sejauh ini hubungan pendamping desa lebih banyak dengan pemerintah desa, jadi yang lebih tau ini adalah pemerintah desa namun untuk hubungannya dengan kami tdk ada masalah apalagi konflik...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Senada dengan pernyataan diatas. Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge menyampaikan bahwa:

“...selama ini hubungan yang terjalin cukup baik, dimana pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik bersama pendamping. Jadi tidak ada konflik baik itu fisik ataupun non

fisik antara pemerintah, masyarakat dengan pendamping desa Langge....” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa Langge. Pendamping desa tidak memiliki permasalahan emosional atau konflik dengan pihak lain baik masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan pemerintahan berupa rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

c. Inovasi Tidak Berkembang

Inovasi pada umumnya dikenal sebagai suatu ide, cara/metode atau barang-barang hasil buatan manusia yang baru baru dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi tidak hanya menekankan pada pembuatan barang baru dari sebelumnya yang tidak. Tapi inovasi berupa pengembangan ide atau cara-cara atau barang-barang yang sudah ada menjadi beda dari yang sebelumnya.

Dalam kegiatan pendampingan program pemberdayaan inovasi sangat penting sekali dalam hal mencapai efektivitas pelaksanaan program. Inovasi dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dari inovasi strategi pendampingan, inovasi ide/gagasan serta metode mencapai tujuan.

Terkait adanya inovasi dari pendamping desa dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat di Desa Langge Kecamatan Anggrek. Kepala desa Langge mengemukakan bahwa:

“...pada setiap tahun pendamping desa mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, namun walau demikian inovasi yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan belum maksimal. Adapun inovasi yang dilakukan oleh pendamping berupa sosialisasi kepada masyarakat...” (Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Sama dengan pendapat diatas Sekertaris desa Langge juga mengemukakan bahwa:

“...dalam menjalankan peran sebagai pendamping desa Langge, sejauh ini inovasi yang dilakukan belum maksimal. Setau saya inovasi yang ada hanya berupa sosialisasi kepada masyarakat itu saja....” (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Berbeda dengan pernyataan diatas. ketua BPD desa Langge menyampaikan bahwa:

“...saya tidak pernah melihat pendamping desa melakukan inovasi dalam kegiatan pendampingan program pemberdayaan. Mereka hanya melakukan apa yang sudah ada di juknis. Adapun yang dilakukan pendamping desa Langge berupa mengajak masyarakat dan pemerintah desa ketika ada pertemuan-pertemuan di desa ini....” Hasil Wawancara, SA, 19 Februari 2024).

Terkait adanya inovasi yang dilakukan oleh pendamping desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pendamping desa Langge mengemukakan bahwa:

“...ya kami melakukan inovasi, untuk inovasi kami TPP sudah melakukan pendampingan. setiap tahun kami TPP ada penyegaran dan peningkatan kapasitas khusus dalam hal pendampingan. untuk saat ini kami fokus pada penguatan pendampingan sesuai bidang-bidang dan prioritas penggunaan dana desa terutama penurunan angka stunting....” Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Menganai adanya inovasi dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa Langge. Iko Mustapa selaku masyarakat desa Langge menyatakan bahwa:

“...inovasi pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa saat ini belum ada. Sebab pendamping desa hanya lebih banyak berada di kantor desa. Jadi kami tidak begitu tau terkait inovasi yng telah pendamping lakukan...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Senada dengan pernyataan diatas. Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge menyampaikan bahwa:

“...tidak ada inovasi yang dilakukan oleh pendamping desa. Sebab pendamping desa hanpir tidak pernah terlihat berada di desa atau di tengah masyarakat...” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa Langge. Pendamping desa Langge hanya menjalankan tugasnya berdasarkan juknis, sehingga tidak terjadi pengembangan atau inovasi kegiatan pendampingan baik itu inovasi metode pendampingan ataupun inovasi ide pengembangan program pemberdayaan masyarakat desa Langge.

d. Penolakan Dari Kelompok Tertentu

Dalam menjalankan setiap program yang berada dimasyarakat tentu tidak hanya sekedar memperhatikan kegunaan atau dampak program terhadap masyarakat secara ekonomis. Namun harus mempertimbangkan cara pelaksanaan program agar tidak

bersinggungan dengan adat dan budaya masyarakat serta dampak lingkungan yang muncul dari pelaksanaan suatu program.

Pelaksanaan program pemberdayaan dimasyarakat dipandang sebagai upaya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Pelaksanaan program tersebut akan diterima atau justru akan mendapatkan penolakan tergantung *utilitas*-nya serta cara yang diambil dalam pelaksanaan-nya.

Perihal adanya penolakan dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat di Desa Langge Kcamatan Anggrek. Kepala desa Langge menyatakan bahwa:

“...saya sebagai kepala desa tidak pernah mendengar adanya masyarakat yang tidak suka dengan pendamping atau melihat tindakan-tindakan yang sifatnya menolak adanya pendamping desa selain itu terkait program pemberdayaan masyarakat desa justru ini merupakan tindakan yang bagus sehingga masyarakat juga tidak menolak terkait program pemberdayaan tersebut ...”
(Hasil Wawancara, FH, 18 Februari 2024).

Seperti pernyataan kepala desa diatas terkait tidak adanya penolakan dalam pelaksanaan program pemberdayaaan. Hal yang sama juga diungkapkan sekertaris desa Langge bahwa:

“...pelaksanaan program pemberdayaan ada hal yang bagus. Sehingga tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menolak adanya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Selain itu masyarakat juga tidak menolak atau memperlihatkan hal-hal seperti rasa tidak suka dengan adanya petugas pendamping desa... (Hasil Wawancara, EB, 18 Februari 2024).

Senada dengan pernyataan diatas. ketua BPD desa Langge mengemukakan bahwa:

“...sama sekali tidak ada penolakan pada pelaksanaan program pemberdayaan ini juga terhadap petugas pendamping.malah tentu kami juga bersyukur dengan adanya pendamping desa. Kami melaksanakan tugas sebagai bagian dari pemerintahan sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku....” Hasil Wawancara, SA, 19 Februari 2024).

Mengenai adanya penolakan terhadap program pemberdayaan dan pendamping desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pendamping desa Langge menyatakan bahwa:

“...Tidak ada penolakan terhadap kami, kami sangat dibutuhkan disetiap moment kegiatan pendampingan. Begitu juga terhadap program tidak ada penolakan, program yang masuk ke desa lewat dana desa sangat menyentuh dan tepat sasaran pada masyarakat...” Hasil Wawancara, NW, 21 Februari 2024).

Terkait adanya penolakan terhadap program pemberdayaan. Iko Mustapa selaku masyarakat desa Langge mengatakan bahwa:

“...sebagai masyarakat tentu kami tidak menolak dengan program pemberdayaan karna itu sesuatu yang bagus. Kami juga tidak menolak dengan adanya pendamping desa. Tapi kami hanya lebih berharap pendamping tidak hanya berada di kantor desa tapi bisa bersama masyarakat juga...” (Hasil Wawancara, IM, 19 Februari 2024).

Ungakapan yang disampaikan diatas sama juga dengan apa yang diungkapkan Hamsa Usman selaku masyarakat desa Langge menyampaikan bahwa:

“...karna program pemberdayaan itu program yang baik tentu kami tidak akan menolak. Tapi untuk pelibatan partisipasi

masyarakat dapat lebih dioptimalkan lagi....” (Hasil Wawancara, HU, 19 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa Langge. Pendamping desa tidak mendapatkan penolakan dari pemerintah dan juga masyarakat desa Langge. Begitu program pemberdayaan sangat mendapatkan respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya melalui kegiatan pendamping dapat lebih di optimalkan.

1.2 PEMBAHASAN

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Setiap indivdu dalam masyarakat memiliki kesempatan dalam menjalankan perannya berdasarkan kedudukan dan statusnya dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (2017), mengemukakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Merton (dalam Raho 2007) mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Lebih lanjut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer 2003) teori peran memberikan suatu konseptual dalam studi perilaku di dalam

organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan indikator pemberdayaan. Maka indikator pemberdayaan yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari indikator: 1) Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan. 2) Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. 3) Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

a. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.

Pendamping desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan program pemberdayaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka dapat memberikan informasi yang diperlukan,

memotivasi, dan memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat desa Langge Kecamatan Anggrek pada dasarnya merupakan suatu proses alamiah masyarakat. Namun di Era modernisasi seperti saat ini sangat jarang dijumpai masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa atas dasar kehendak masyarakat sendiri. Sehingga untuk mengembalikan partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan peran dari semua pihak pemangku kepentingan termasuk peran pendamping desa.

Lebih lanjut bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian Desa, pemberdayaan masyarakat sebagai mana yang 37 dimaksudkan pemerintah didalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poin (2) dilakukan dengan: a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping desa Langge Kecamatan Anggrek telah melaksanakan perannya dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Langge. Partisipasi masyarakat tersebut diawali dengan hadirnya masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa.

- b. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat

Pengembangan program pemberdayaan masyarakat adalah proses yang kompleks yang membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Aprillia Theresia, (2014) Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk lebih meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan memainkan peran ini, pendamping desa dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran pendamping dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat bahwa pendamping desa Langge kecamatan Anggrek tidak melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan hingga saat ini hanya berupa keterlibatan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

c. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).” (Salthory, A.D, 2011:11)

Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di tingkat desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan peran pendamping desa di desa Langge kecamatan Anggrek, pendamping desa Langge melakukan pengawasan sebagai bagian tugas dari tenaga pendamping desa. Namun pengawasan ini hanya terfokus pada kegiatan pertemuan rapat atau pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah desa berserta masyarakat. Untuk pengawasan pelaksanaan program di tingkat lapangan atau

implementasi ditingkat masyarakat itu tidak ada pengawasan dari pendamping desa.

2. Faktor Penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemberdayaan masyarakat di semua bidang tidak lepas dari segala hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan.

Dalam menjalankan peran sebagai pendamping desa untuk memberdayakan masyarakat merupakan suatu peranan yang tidak mudah. Banyak faktor yang akan menjadi penghambat dalam memberdayakan masyarakat agar aktif pada setiap kegiatan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga seorang pendamping desa harus memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam melaksanakan tugas perannya.

Hambatan dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai pendamping juga dihadapi oleh pendamping desa yang berada dikecamatan anggrek. Faktor penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo

Utara dilihat dari indikator: 1) kurang tepatnya perencanaan. 2) adanya konflik dan kurangnya motivasi untuk bekerja. 3) inovasi tidak berkembang. 4) penolakan dari kelompok tertentu.

a. Kurang Tepatnya Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan atau program dapat tercapai hasil sesuai yang diharapkan apabila perencanaan yang telah disusun telah sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya suatu program tidak akan mencapai hasil yang diinginkan bila perencanaannya kurang tepat. Sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan desa harus benar-benar berdasarkan perencanaan yang tepat.

Perencanaan yang tidak tepat dapat menyebabkan program tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa disebabkan oleh tujuan yang tidak realistis, langkah-langkah yang tidak jelas, atau strategi yang tidak efektif. Sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja dapat terbuang sia-sia jika program tidak direncanakan dengan baik. Anggaran bisa melebihi batas yang telah ditentukan dan waktu pengerjaan bisa jauh lebih lama dari yang direncanakan.

Selain itu, Kurang tepatnya perencanaan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan program atau proyek. Perencanaan yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan perennya pendamping desa harus memiliki keterampilan dalam menyusun rencana program pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian pendamping desa dalam melaksanakan perannya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa Langge telah berdasarkan rencana kerja. Namun perencanaan pendampingan yang disusun oleh pendamping lebih pada kegiatan-kegiatan pendampingan pemerintah desa berupa pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

b. Adanya Konflik Dan Kurangnya Motivasi Untuk Bekerja

Konflik ialah suatu kompetisi yang terjadi dalam sebuah organisasi hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai tujuan perusahaan, antar unit kerja, antar bagian, para manager yang bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan posisi dan kekuasaan.

Veithzal Rival Zainal (2014:718) menemukan bahwa konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok (dalam suatu organisasi/perusahaan) yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Konflik kerja juga dapat diartikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain. Selain itu konflik diartikan sebagai perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik sebagai proses yang bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mengetahui secara negatif sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Pengertian ini mencakup

rentang yang luas dari konflik yang dialami orang dalam perusahaan, ketidakcocokan tujuan, perbedaan penafsiran fakta, ketidaksepakatan yang didasarkan pada pengharapan perilaku, dan lain-lain.

Setiap organisasi dalam mencapai tujuan membutuhkan kerjasama yang baik sesama team atau anggota. Serta adanya motivasi dari pimpinan. sehingga dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting bagi setiap orang yang berada didalam organisasi meminimalisir potensi konflik yang dapat menghambat terjadinya kerjasama antar individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Begitu juga dalam kegiatan pendampingan desa, untuk mencapai tujuan program pendampingan maka pendamping desa perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjanya baik itu pemerintah desa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa Langge. Pendamping desa telah tidak memiliki permasalahan emosional atau konflik dengan pihak lain baik masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan pemerintahan berupa rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

c. Inovasi Tidak Berkembang

Inovasi pada umumnya dikenal sebagai suatu ide, cara/metode atau barang-barang hasil buatan manusia yang baru baru dirasakan

sebagai sesuatu yang baru. Inovasi tidak hanya menekan pada pembuatan barang baru dari sebelumnya yang tidak. Tapi inovasi berupa pengembangan ide atau cara-cara atau barang-barang yang sudah ada menjadi beda dari yang sebelumnya.

Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) mengartikan inovasi di dalam pelayanan public bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat.

Dalam kegiatan pendampingan program pemberdayaan inovasi sangat penting sekali dalam hal mencapai efektivitas pelaksanaan program. Inovasi dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dari inovasi strategi pendampingan, inovasi ide/gagasan serta metode mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjalankan peranan sebagai pendamping desa Langge. Pendamping desa Langge hanya menjalankan tugasnya berdasarkan juknis, sehingga tidak terjadi pengembangan atau inovasi kegiatan pendampingan baik itu inovasi metode pendampingan ataupun inovasi ide pengembangan program pemberdayaan masyarakat desa Langge.

d. Penolakan Dari Kelompok Tertentu

Dalam menjalankan setiap program yang berada dimasyarakat tentu tidak hanya sekedar memperhatikan kegunaan atau dampak

program terhadap masyarakat secara ekonomis. Namun harus mempertimbangkan cara pelaksanaan program agar tidak bersinggungan dengan adat dan budaya masyarakat serta dampak lingkungan yang muncul dari pelaksanaan suatu program.

Marunduh (2004) dan Atmadja (2006) dalam Fauzan Hidayat (2020:3:Vol.5) mengungkapkan dari sisi politis bahwa sebab resistensi terhadap suatu kebijakan muncul karena : faktor budaya (adanya tatanan norma dalam masyarakat yang tidak diindahkan), komunikasi, dan faktor kualitas SDM. Dari sisi ekonomi, Kautsary (2005) menyimpulkan bahwa resistensi dapat terjadi disebabkan oleh keterbatasan informasi, intrust terhadap kinerja birokrasi, ancaman terhadap ekonomi dan kurangnya koordinasi dan sosialisasi.

Pelaksanaan program pemberdayaan dimasyarakat dipandang sebagai upaya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Pelaksanaan program tersebut akan diterima atau justru akan mendapatkan penolakan tergantung *utilitas*-nya serta cara yang diambil dalam pelaksanaan-nya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menjalankan peranannya Pendamping desa tidak mendapatkan penolakan dari pemerintah dan juga masyarakat desa Langge. Begitu program pemberdayaan sangat mendapatkan respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaanya melalui kegiatan pendamping dapat lebih di optimalkan.

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Peran Pendamping Desa Anggrek Dalam Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari indikator Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan, Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa: a) pendamping desa telah berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. b) pendamping desa belum berperan secara maksimal dalam pengembangan program pemberdayaan, sebab hingga saat ini kegiatan masyarakat masih berputar pada rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. c) dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat, pendamping desa anggrek juga melakukan pengawasan namun pengawasan tersebut masih dalam

terfokus pada rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk pemerintah desa.

2. Faktor Penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Faktor penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Langge ditinjau dari aspek kurang tepatnya perencanaan, adanya konflik dan kurangnya motivasi untuk bekerja, dan inovasi tidak berkembang serta penolakan dari kelompok tertentu menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan kegiatan pendampingan telah sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pendamping. Namun, kegiatan tersebut lebih terfokus pada kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. b) Pendamping desa telah tidak memiliki permasalahan emosional atau konflik dengan pihak lain baik masyarakat dan pemerintah desa. sebab keberadaan pendamping tidak terus menerus berada di desa Langge terutama berada di masyarakat. c) pendamping desa tidak melakukan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan. Namun lebih pada penggunaan juknis. d) dalam pelaksanaan tugasnya pendamping desa Langge tidak mendapatkan tindakan yang bersifat penolakan baik dari pemerintah desa dan masyarakat.

1.2 Saran

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah kemukakan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Peran pendamping desa dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemebrdayaan harus lebih ditingkatkan, agar kegiatan pemberdayaan tidak hanya sekedar pada rapat pengambilan keputusan namun dapat mencakup kegiatan evaluasi. Sehingga dengan demikian peran pendamping desa yang menyangkut dengan pengembangan program pemberdayaan dan pengawasan perlu di tingkatkan.

2. Faktor Penghambat Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam penyusunan rencana kegiatan pendampingan harus lebih dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan pertemuan yang buat oleh pemerintah desa. Sehingga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perlu adanya inovasi dalam kegiatan pemberdayaan, dimana pendamping tidak bersikap kaku dan hanya tarpaut dengan juknis. namun dapat melakukan inovasi ataupun improvisasi program berdasarakan kebutuhan masyarakat desa Langge

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Assauri, 2017. *Manajemen*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2016. *Efek Samping Pembangunan*, Calpulis, Yogyakarta
- Haqqie, S. N, 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan*, FIP UNNES, Semarang
- Koentjaraningrat, 2015. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia
- Meriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Miles M dan Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Edisi Revisi, Penerbit Setara Press
- Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Oos M. Anwas, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung
- Rahardjo, 2018. *Pembangunan Pedesaan*. Penerbit Expert, Yogyakarta
- Raho Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta
- Rina Mei Mirnasari, 2013. *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih*. Universitas Airlangga.
- Salthory A.D, 2011. *Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Mandiri Pedesaan (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/kelurahan di Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang)*. Universitas Lampung
- Soejono Soekanto, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Sulistiyo, 2019. *Pemberdayaan Keluarga Yang Hidup Di Lingkungan Pedesaan, Literasi Desa Mandiri*, Temanggung

- Sumodiningrat dkk, 2016. Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar
Yogyakarta
- Veithzal Rival Zainal, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk
Perusahaan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007. Manajemen Pemberdayaan, Elex Media
Komputindo

Dokumen

- UU No. 6 tahun 2014 tentang desa
- PERMEN Desa No 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6
Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA (Studi Kasus Di Desa Langge)

Oleh :

MARYAM BUHELI

NIM. S21.20.035



**POGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2024

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Maryam Buheli

NIM : S2120035

Judul : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Di Desa Langge)

Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Peran Pemberdayaan Masyarakat	1. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.	1. Apakah dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping desa mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan? 2. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan pendamping desa yang telah melibatkan masyarakat? 3. Bagaimana peran/cara yang dilakukan pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan pembangunan desa.
		2. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.	1. Apakah pendamping desa menguasai lingkup kerja pendampingan pemberdayaan sesuai dengan aturan pelaksanaan atau juknis pendampingan? 2. Apakah dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping desa mengembangkan program pemberdayaan masyarakat? 3. Bagaimana peran/cara pendamping desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat?

		3. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pelaksanaan tugas pendamping desa melakukan pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ? 2. Seperti apa kegiatan masyarakat yang telah dilakukan pengawasan oleh pendamping desa? 3. Bagaimana peran/cara pendamping desa dalam melakukan pengawasan program pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa?
Apa saja faktor Penghambat dari Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.	Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat	1. Kurang tepatnya perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping desa memiliki perencanaan kegiatan pendampingan? 2. Bagaimana penyusunan rencana kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping desa? 3. Apakah penyusunan rencana pendampingan oleh pendamping desa dilakukan bersama pemerintah desa dan masyarakat? 4. Apakah kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan desa memiliki perencanaan kegiatan yang disusun sebelumnya? 5. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di desa? 6. Apakah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa yang didampingi oleh pendamping telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya?
		2. Adanya konflik dan kurangnya motivasi untuk bekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendamping desa yang melakukan tugas pendampingan memiliki konflik dengan mitra

			<p>kerjanya? Seperti pemerintah desa, masyarakat dan rekan pendamping lainnya.</p> <p>2. Apakah pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping melaksanakan tugasnya secara penuh dan totalitas atau hanya berdasarkan keinginan dan kemauan pribadinya?</p>
		3. Inovasi tidak berkembang	<p>1. Apakah dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping, pendamping desa melakukan inovasi dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>2. Apakah pendamping desa mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas pendampingan?</p> <p>3. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pendamping desa dalam melakukan pendampingan masyarakat?</p>
		4. Masalah finansial	<p>1. Apakah dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping desa mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontrak pekerjaan?</p> <p>2. Apakah gaji yang diterima oleh pendamping dalam melaksanakan tugasnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya?</p> <p>3. Apakah program pemberdayaan atau pembangunan desa yang didampingi oleh pendamping desa memiliki ketersediaan anggaran berdasarkan perencanaan anggaran?</p>

		5. Penolakan dari kelompok tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendamping desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping mendapatkan penolakan dari masyarakat? 2. Apakah program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang didampingi oleh pendamping desa mendapatkan penolakan dari masyarakat atau pemerintah desa?
--	--	-------------------------------------	--

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa Langge

Bapak fredri Hamim, SE

Pada hari Senin, 18 Februari 2024 di Kantor Desa Langge



Wawancara dengan Sekertaris Desa Langge

Bapak Ebit Bahrudin, S.IP

Pada hari Senin, 18 Februari 2024 di Kantor Desa Langge



Wawancara dengan Pendamping Desa

Ibu Nuning Wolinelo, S.Pdi

Pada hari Kamis, 21 Februari 2024 di Kantor Desa Langge



Wawancara dengan Ketua BPD

Ibu Sarini Ali

Pada hari Selasa, 19 Februari 2024 di Rumah Ketua BPD



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Bapak Iko Mustapa

Pada hari Selasa, 19 Februari 2024 di Rumah Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

Bapak Hamsa Usman

Pada hari Selasa, 19 Februari 2024 di Rumah Masyarakat

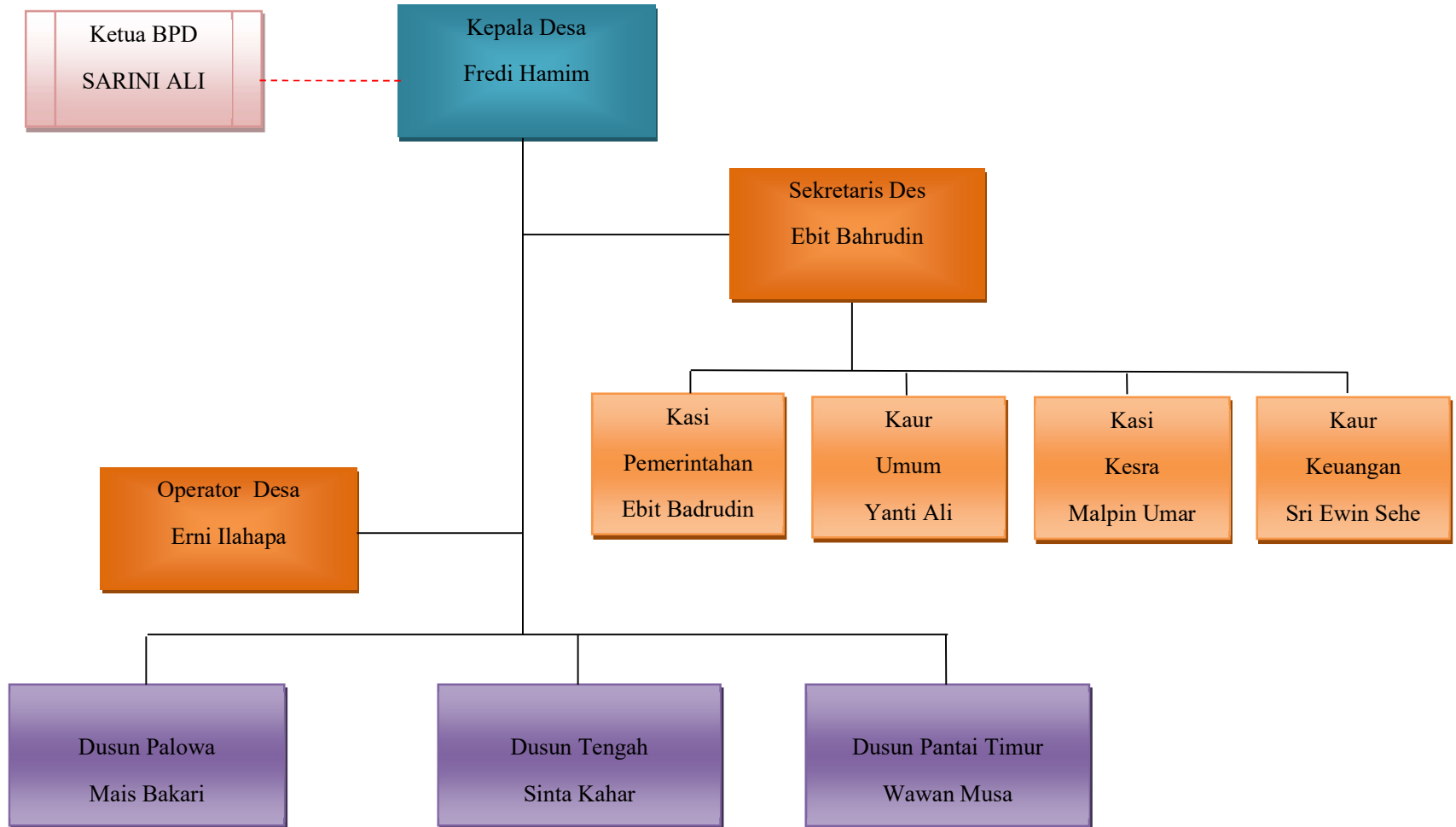


Wawancara dengan Masyarakat

Ibu Sandra Ali

Pada hari Selasa, 19 Februari 2024 di Rumah Masyarakat

**STRUKTUR PEMERINTAH
DESA LANGGE KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4987/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Langge

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Maryam Buheli

NIM : S2120035

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA LANGGE KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN
GORONTALO UTARA (STUDI KASUS DI DESA LANGGE)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Januari 2024

Ketua
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ANGGREK
DESA LANGGE

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470/DL-ANGG/LB / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FREDI HAMIM,SE
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Kantor Desa Langge Kecamatan Anggrek
Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : MARYAM BUHELI
Nim : S2120035
Judul skripsi : Peran Pendamping desa dalam pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus
Desa langge)
Fakultas/jurusan : Ilmu sosial dan ilmu politik/ilmu pemerintahan
Universitas : Ichsan Gorontalo

Telah Melaksanakan Penelitian Di Kantor Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara Selama 3 (Tiga Bulan) Mulai Dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan
Maret 2024

April 2024
Kepala Desa Langge

FREDI HAMIM,SE

Tembusan.

1. Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
3. Arsip



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 048/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MARYAM BUHELI
NIM : S2120035
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **18%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,



Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 23 Mei 2024
Tim Verifikasi,



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

**SKRIPSI_S2120035_MARYAM BUHELI.d
OCX**

AUTHOR

S2120035 MARYAM BUHELI

WORD COUNT

10983 Words

CHARACTER COUNT

75635 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

170.0KB

SUBMISSION DATE

May 19, 2024 3:24 PM GMT+8

REPORT DATE

May 19, 2024 3:25 PM GMT+8

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

[Summary](#)

18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	docplayer.info Internet	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	1%
3	repository.ung.ac.id Internet	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet	1%
5	123dok.com Internet	1%
6	repository.iainkudus.ac.id Internet	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
8	mangunjayakec.blogspot.com Internet	<1%

Sources overview

9	pendaftaran-cpns.blogspot.com Internet	<1%
10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
11	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
12	scribd.com Internet	<1%
13	nurlatihan.blogspot.com Internet	<1%
14	publikasi.poliije.ac.id Internet	<1%
15	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
16	repository.unmuhjember.ac.id Internet	<1%
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
18	azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com Internet	<1%
19	moam.info Internet	<1%
20	e-laporankkn.uinjkt.ac.id Internet	<1%

Sources overview

21	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
22	ejournal.ipdn.ac.id	<1%
	Internet	
23	Rindiani Rindiani, Maskan Maskan. "Peran Kepala Desa Dalam Pemb...	<1%
	Crossref	
24	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
	Internet	
25	publikasiilmiah.unwahas.ac.id	<1%
	Internet	
26	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview

CURRICULUM VITAE



A. Identitas

Nama : Maryam Buheli

Nama Panggilan : Iyam

Nim : S2120035

Tempat Tanggal Lahir : Kwandang 10 Juni 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Angkatan Ke- : XXVII Tahun 2020

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Status : Mahasiswa Karyawan

Agama : Islam

Alamat : Desa Ilangata Kecamatan Anggrek

Nama Ayah : Umar N. Buheli

Nama Ibu : Sartin H. Hutulo

Jumlah Saudara Kandung : 6 Orang

Nama Kakak : Fatmawati Umar

: Suharto Buheli

: Sabuati Buheli

: Suparti Buheli

Nama Adik : Sunarti U. Buheli

: Susanti U. Buheli

Nama Suami : Harun Suma

Anak : Ghiyas Putra H. Suma

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN II Moluo Moluo Lulus Pada Tahun 1994
2. SMP Negeri 8 Gorontalo Lulus Pada Tahun 2000
3. SMA, SKB Kwandang Lulus Pada Tahun 2011
4. Universitas Ichsan Gorontalo utara 2020

